

## RINGKASAN

**KOMPARASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS  
PERBANDINGAN NO.122/PID.SUS/2020/PN.PML DAN  
NO.87/PID.SUS/2021/PN.SDK)**

***COMPARISON OF CRIMINAL CHARGES AGAINST CIVIL SERVANTS IN  
NARCOTICS CRIMES (CASE STUDY OF VERDICT NUMBER  
122/PID.SUS/2020/PN.PML AND NUMBER 87/PID.SUS/2021/PN.SDK)***

**Giffari Hayfa Labiba (1810611268)**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*E-mail:* [giffarihayfa@gmail.com](mailto:giffarihayfa@gmail.com)

### **Abstrak**

Saat ini, tindak pidana narkotika sudah merambah berbagai penjuru daerah di Indonesia dan meluas di seluruh lapisan masyarakat termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana narkotika sangat bertentangan dengan program yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil selaku abdi negara, diangkat oleh negara dan diberikan upah dari keuangan negara, memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang yang bukan Pegawai Negeri. Perbedaannya terdapat pada kewenangan tertentu yang diberikan oleh negara untuk Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, jika seorang Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam tindak pidana narkotika, maka sudah sepatutnya sanksi pidana yang diberikan lebih berat dari orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Terkait aturan pemberatan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana narkotika belum diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dari permasalahan tersebut, penulis membuat penelitian mengenai komparasi pemberatan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Narkotika.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Narkotika, Pegawai Negeri Sipil, Pemberatan Pidana.

### ***Abstract***

*Currently, narcotics crimes have penetrated various regions in Indonesia and are widespread in all levels of society including civil servants (PNS). The involvement of Civil Servants in narcotics crimes is very contrary to the program required by the government, namely the National Disciplinary Movement (GDN) in Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. Civil Servants as state servants, appointed by the state and given wages from state finances, have a different position from people who are not Civil Servants. The difference lies in the certain authority granted by the state to civil servants. Therefore, if a Civil Servant is involved in a narcotics crime, then it is appropriate that the criminal sanctions given are more severe than those who are not Civil Servants. Regarding the criminal enforcement rules against Civil Servants involved in narcotics crimes, it has not been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. So from this problem, the author made a study on the comparison of criminal charges against Civil Servants in Narcotics Crimes.*

***Keywords:*** *Narcotics Crimes, Civil Servant, Criminal Prosecution.*